

**TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN  
PEMERINTAHAN DESA**

(Studi Kritis Implementasi Kebijakan Nawa Cita)



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2018**

**TESIS**  
**TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**  
(Studi Kritis Implementasi Kebijakan Nawa Cita)

**Disusun oleh**

**KASMI'AN**  
**2014-02-008**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

pada tanggal .....

**Susunan Dewan Pengaji**

Pembimbing Utama

Dr. Subarkah, S.H.,M.Hum

Pembimbing Pendamping

Dr.Sukreno, S.H.,M.Hum

Anggota Dewan Pengaji I

Dr. Suparnyo, S.H.,M.S

Anggota Dewan Pengaji II

Dr. Dra. Sulistyowati, S.H.,CN

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister  
Tanggal .....



**Dr. Hidayatullah, S.H.,M.Hum**  
**Ketua Program Studi Magister Hukum**

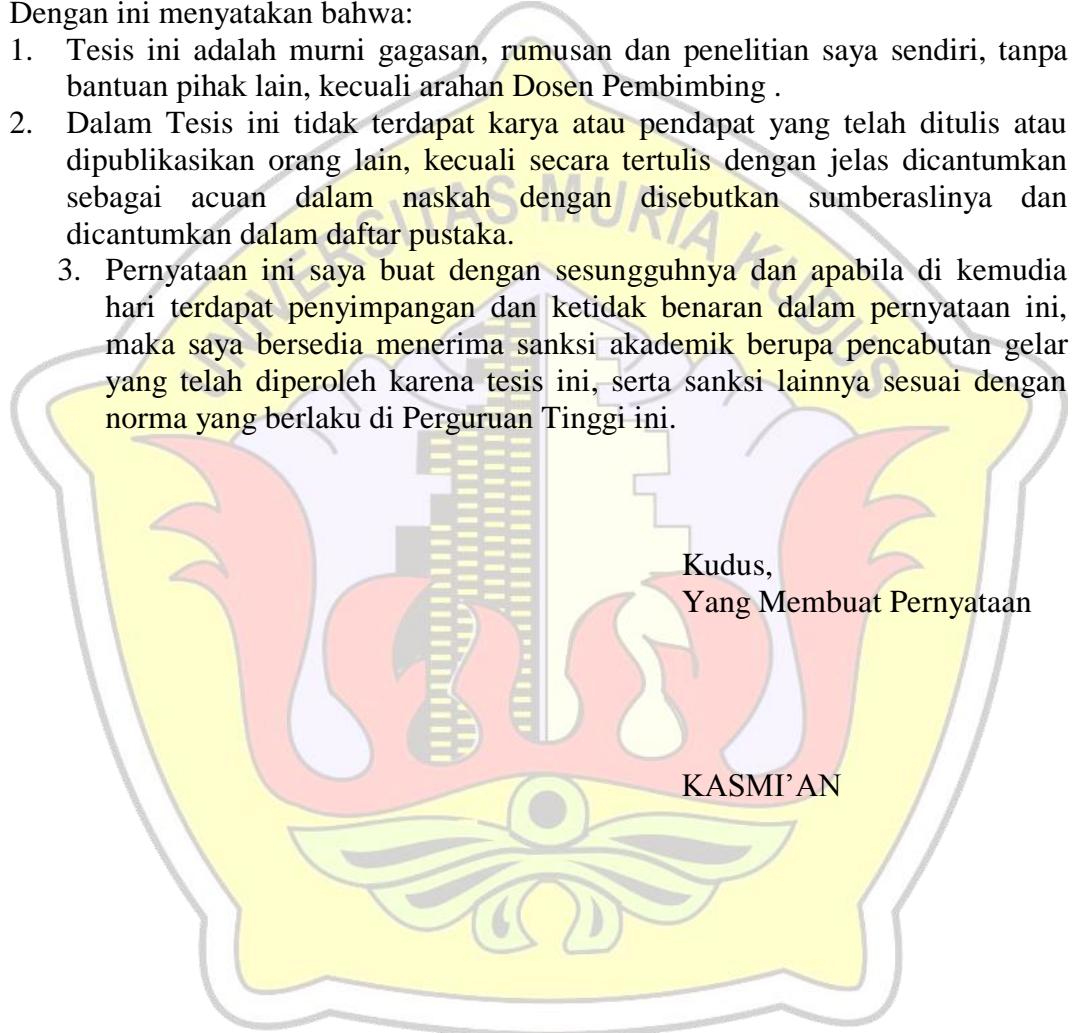
## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASMI'AN  
NIM : 2014-02-008

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing .
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumberaslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudia hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.



Kudus,  
Yang Membuat Pernyataan

KASMI'AN

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik dan Hidayah-Nya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini dengan judul “**TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kritis Implementasi Kebijakan Nawa Cita)**”.

Pada dasarnya tesis ini disusun guna melengkapi sebagian dari tugas yang sekaligus merupakan persyaratan dalam mencapai derajat magister pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Subarkah, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing Utama yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan;
3. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan Tesis ;
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, khususnya dalam upaya perolehan data dalam penulisan Tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis nantikan untuk kesempurnaan penulisan tesis.

Akhirnya, penulis berharap, semoga tesis ini dapat berguna bagi penulis khususnya, dan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Kudus,

Penulis

**K A S M I ' A N**

## ABSTRACT

This thesis wants to reveal and review Law No. 6 of 2014 related to the implementation of Nawa Cita, especially village sovereignty from the aspiration of the president of Jokowi-JK. Village sovereignty is closely related to the authority or authority of the village. Authority or authority is a term commonly used in the public law field. The existence of village authority and the lack of clarity on the allocation of village funds in the distribution of funds and the strategy of the 2014-2019 Indonesian National Development target and indicator based on President Joko Widodo's Vision-Mission through Nawa Cita.

This thesis research questioned, first whether Law Number 6 of 2014 concerning this Village had the opportunity to create sovereignty in the village government as aspired? secondly how far is the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning this Village through the implementation of the Nawa Cita policy of the Jokowi – Jusuf Kalla government? and the third problem arises and the alternative solution

The approach used in this thesis research is juridical empirical meaning also as an approach that analyzes the law not merely as a normative rule of law, but the law here is seen as a symptom of behavior and patterns of society in life, always interact and relate to social aspects such as politics, economics, social and culture. Primary data collection is done through observation, interviews and questioner, while secondary data with the concept and interpretation of legislation.

*Keyword :Villages, Village Government Sovereignty, NawaCita*

## **ABSTRAK**

Tesis ini ingin mengungkapkan dan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan penerapan nawacita, khususnya kedaulatan desa dari nawa cita presiden Jokowi-JK. Kedaulatan desa ini erat kaitannya dengan kewenangan atau wewenang yang dimiliki desa. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Adanya kewenangan desa dan belum adanya kejelasan peruntukan dana desa dalam pembagian dana serta strategi target dan indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-2019 berdasarkan Visi- Misi Presiden Joko Widodo melalui Nawa Cita.

Penelitian tesis ini mempertanyakan, pertama apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini berpeluang menciptakan kedaulatan dalam pemerintahan desa sebagaimana dicita-citakan?, kedua sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini melalui implementasi kebijakan Nawa Cita pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla? dan yang ketiga problematika yang timbul dan alternatif penyelesaiannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis emperis mengandung arti pula sebagai pendekatan yang menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum disini dilihat sebagai gejala perilaku dan pola masyarakat dalam kehidupan, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan kuisener, sedangkan data sekunder dengan konsep dan interpretasi perundang-undangan.

Kata Kunci : Desa, Kedaulatan Pemerintah Desa, Nawa Cita

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<i>i</i>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<i>ii</i>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<i>iii</i>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<i>iv</i>
<b>ABSTRACT .....</b>	<i>v</i>
<b>ABSTRAK.....</b>	<i>vi</i>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<i>vii</i>

### BAB PENDAHULUAN

I

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan Praktis .....	12
2. Tujuan Teoritis.....	12
3. Manfaat Penelitian .....	13
D. Metode Penelitian .....	13
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Populasi.....	17
4. Sampel.....	18
5. Lokasi.....	19
6. Jenis Data.....	19
(a) Primer.....	19
(b) Sekunder.....	21
7. Metode Pengumpulan Data.....	22
(a) Primer.....	22
(b) Sekunder.....	24
8. Metode Analisa Data.....	25
9. Sistematika Penulisan.....	26

### BAB TINJAUAN PUSTAKA

II

A. Desa .....	27
B. Otonomi Desa .....	30
C. Kedaulatan Pemerintah Desa .....	36
D. Birokrasi .....	43
E. <i>Good Governance</i> .....	48

<b>BAB</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
<b>III</b>	A. Peluang Undang-Undang Desa Dalam Menciptakan Kedaulatan Desa .....	54
	1. Dinamika Pengaturan Desadalam Tata Hukum Indonesia Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	54
	2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 ...	62
	3. Kedudukan dan Wewenang Desa .....	74
	B. Permasalahan dan Pemecahan Masalah Undang-Undang Desa Dalam Menciptakan Kedaulatana Desa..	83
	1. Peraturan Terkait Soal Dana Desa Kabupaten Kudus.....	83
	2. Problem Umum .....	90
	3. Problem Dana Desa di Kabupaten Kudus .....	94
	C. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Implementasi Kebijakan NawaCita, Problem Dana Desa .....	100
<b>BAB</b>	<b>P E N U T U P</b>	
<b>IV</b>	A. Simpulan .....	116
	B. Saran .....	119

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR LAMPIRAN**